

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit adalah tanaman yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan. Kelapa sawit akan terus menjadi sektor penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, dan penerimaan ekspor¹ Kesadaran akan pentingnya komoditas kelapa sawit tersebut mendorong pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi tanaman komoditas sawit. Komoditas sawit salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Subsektor ini dimanfaatkan pemerintah untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai sumber perolehan devisa.²

Berbagai upaya yang dilakukan perkebunan besar, seperti proyek-proyek pembangunan swadaya masyarakat dan perkebunan kelapa sawit berkembang sangat pesat. Pada tahun 1968, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia 120 ha, kemudian berkembang pada tahun 2003 menjadi 4.926 ha. Penyebaran perkebunan kelapa sawit juga berkembang, yang berawal 3 provinsi di Sumatera, pada tahun 2003 telah tersebar menjadi 17 propinsi di Indonesia. Sumatera adalah areal terluas di Indonesia yaitu mencapai 75,98%.³

¹ Tim Tanaman Perkebunan Besar, *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2005), hal., 3.

² Tim Penulis PS, *Kelapa Sawit Usaha Budidaya, Pemanfaatan Hasil dan Aspek Pemasaran*, (Jakarta: penerbit Anggota IKAPI, 1994), hal., 8.

³ Tim Tanaman Perkebunan Besar. *op.cit.* hal., 5

Pada tahun 2003, luas areal perkebunan rakyat mencapai 1.827 ha (34,9%), perkebunan Negara seluas 645 ha (12,3%), dan perkebunan swasta seluas 2.765 ha (52,8%). Sumatera mendominasi pengusahaan, sedangkan Kalimantan dan Sulawesi menjadi lokasi pengembangan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat.⁴

Pengalihan usaha yang didukung negara migas ke non-migas, khususnya kelapa sawit adalah dari terjadinya peningkatan kebutuhan akan kelapa sawit dunia. Melihat prospek peningkatan kebutuhan sawit semakin besar, terutama untuk negara-negara Eropa, pemerintah pusat memberi perhatian khusus untuk pengembangan kelapa sawit agar dapat meningkatkan devisa negara dan memberi lowongan kerja bagi masyarakat. Peningkatan produksi kelapa sawit terus berlangsung dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2006, Indonesia menjadi negara produsen nomor satu di dunia.⁵

Sumatera Utara salah satu daerah pemasok kelapa sawit maupun karet. Sebagian perkebunan negara terdapat di Sumatera Utara. Salah satunya PTPN III (persero) yang merupakan Badan Milik Negara Indonesia yang berpusat di daerah Medan Sumatera Utara. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Salah satunya didirikan penggabungan antara PT Perkebunan III, PT Perkebunan IV dan PT Perkebunan V menjadi PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Pada tanggal 14 februari 1996 di Medan Sumatera Utara.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sabar, Lindayanti, Zaiyardam, “ Jalan Terjal Membentuk Karakter Bangsa: Dialektika Petani Versus Pengusaha dan Penguasa Di Sumatera Utara, Riau dan Jambi 1970-2010”, (Jurnal Analisis Sejarah Vol 6, No 2, 2017), hal., 149.

Berhubungan dengan itu PTPN III meresmikan seluruh cabang yaitu di Kabupaten Deli Serdang terdapat dua Deli Serdang I-II, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhan Batu terdapat tiga : Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Selatan.⁶

Perkebunan di Labuhan Batu Induk (Rantauprapat) adalah salah satu cabang dari PTPN III yang memiliki luas lahan 3.876,09 hektar dan luas pabrik 4,5 hektar.⁷ Buruh di perkebunan, dibagi dua yaitu buruh tetap dan buruh harian lepas. Buruh yang didatangkan dari luar Sumatera, dengan cara direkrut dan kemudian diikat dengan sistem syarat sahnya perjanjian kerja, sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 KUHPerdata. Ketentuan ini juga terdapat dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁸

Buruh tetap dan buruh harian lepas adalah pekerja di perkebunan ini. Masing-masing buruh, memiliki perbedaan dalam hak maupun fasilitas. Buruh tetap memiliki hak dalam fasilitas di perkebunan tersebut, dan mendapatkan jaminan sosial maupun kesehatan, buruh harian lepas tidak menjadi tanggung jawab perusahaan dalam fasilitas. Buruh harian lepas pada tahun 2009 hanya di upah perhari sebesar Rp. 25.000- Rp.30.000 tanpa adanya jaminan.⁹

Pada tahun 2003 PTPN III Rantauprapat mendaftarkan perjanjian kerja bersama. Perjanjian ini bertujuan menghentikan permasalahan dan perselisihan yang terus terjadi. Menurut Undang-Undang no 13/2003, PKB adalah perjanjian

⁶ Lihat situs resmi PTPN III pada [http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang kami/](http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang+kami/), diakses pada 8 desember 2017.

⁷ *Ibid.*

⁸ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal., 57.

⁹ *Wawancara* dengan Ardi pada tanggal 26 februari 2018 di pabrik PT P Nusantara III Rantauprapat.

hasil perundingan, antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁰

Sistem kontrol buruh diterbitkan oleh pemerintah, dengan memperkenalkan sanksi-sanksi hukum yang sangat efektif. Mengontrol keberadaan buruh di perkebunan.¹¹ PTPN juga memberikan para buruh sandang pangan *in natura*. Artinya diberikan secara fisik seperti gula, garam, minyak goreng maupun beras. Pihak lain ingin menghapuskan sistem ini, karena menurut mereka diberikan catu seperti itu pun ada kemungkinan di jual kembali, akhirnya catu¹² dihapuskan kecuali beras.

Kebutuhan yang dipenuhi buruh, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, untuk dihargai, dan dicintai. Fasilitas-fasilitas yang diberikan perkebunan seperti rumah, jaminan kesehatan, sekolah, dianggap sebagai jaminan sosial yang mana dibagi rata per hari kerja dari gaji buruh. Hal ini selalu menjadi pemicu perdebatan para buruh. Jaminan sosial digunakan untuk umum, tetapi hanya gaji buruh yang terpotong, karyawan staff maupun pimpinan mendapatkan lebih jaminan khusus seperti tunjangan transpor dan tunjangan jabatan. Perbedaan menjadi permasalahan bagi kaum buruh didalam perusahaan.¹³

¹⁰ *Ibid.* hal., 64.

¹¹ Sjafri Sairin, *Dari Anak Ke Anak buruh Jawa di perkebunan Sumatera Utara Pada Masa Orde Baru*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press ,2014), hal., 11.

¹² *Catu* berarti bagian (makanan, barang, dan sebagainya) yang sudah ditentukan banyaknya; ransum; jatah.

¹³ Soepadiyo Mangoensoekarjo dan Haryono Semangun, *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers 2003), hal., 506.

Buruh tetap di perkebunan merasa sejahtera bekerja di area perkebunan, karena berbagai pelayanan tersedia, seperti fasilitas rumah maupun pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau para buruh perkebunan percaya bahwa wilayah perkebunan telah menyediakan tempat dan suasana tenang untuk menjalani kehidupan.¹⁴ Kebijakan-kebijakan tentang perburuhan yang membela buruh, yaitu adanya Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30): tentang upah. Upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha, pemberi kerja, kepada pekerja. Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi, pada dasarnya merupakan balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja. Prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi.¹⁵

Kualitas bangunan rumah staff dan pimpinan sangat mencolok perbedaannya dibanding emplasmen. Rumah staf terbuat dari beton, kaca nako dan berdiri tunggal, sedangkan rumah buruh terbuat dari papan dan model Koppel (2 rumah satu bangunan). Pengkhususan letak dan kualitas rumah staf menunjukkan bahwa seolah-olah mereka adalah golongan yang sangat istimewa dan berada pada kasta tertinggi dalam perusahaan sehingga harus lebih diutamakan kualitas bangunan rumah dan kualitas hidupnya. Pengkotakan rumah staf dengan emplasmen menyebabkan tidak terjalinnya sosialisasi staf dengan buruh, sehingga komunikasi

¹⁴ Wawancara dengan Genes pada tanggal 14 Maret 2018 di komplek perumahan perkebunan.

¹⁵ Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia", (Jurnal Ekonomi Sosial Vol 8, No 3, Oktober 2012), hal., 200.

keseharian antara buruh dengan staf akan terjadi dalam hubungan kerja di lapangan. Hal ini dimaksudkan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun image staf sebagai orang yang lebih bermartabat dan terhormat sehingga harus dipatuhi perintahnya. Hal ini merupakan warisan tradisikolonial jaman penjajahan untuk melanggengkan kekuasaannya dalam menguasai tanah Indonesia.¹⁶ Realitanya kehidupan sosial ekonomi buruh di PTPN III Rantauprapat Sumatera Utara ini penting untuk dikaji. Kajian diatas pada perubahan kehidupan buruh dari segi ekonomi maupun sosial. Persoalan pokoknya adalah perubahan maupun peningkatan atau bahkan penurunan dalam kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini bisa dibandingkan dengan kehidupan buruh di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk meninjau lebih jauh kehidupan sosial ekonomi buruh di PTPN III Rantauprapat Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Perbedaan antara pimpinan dengan buruh sangat terlihat, dari masa kolonial hingga masa reformasi, perubahan dari status sosial, kelas sosial maupun kesenjangan sosial tidak berubah didunia perkebunan, begitu pun dengan perekonomian buruh. PT Perkebunan Nusantara III Rantauprapat adalah badan usaha milik Negara yang memiliki sumber daya alam yang menjadi primadona. Permasalahannya adalah apakah buruh di PT Perkebunan Nusantara III Rantauprapat termasuk primadona untuk Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu untuk memudahkan pembahasan nantinya, maka perlu dilakukan perumusan masalah yaitu.

1. Bagaimana sistem perekrutan buruh PTPN III Kabupaten Rantauprapat?

¹⁶ Wawancara dengan Genes pada tanggal 14 maret 2018 di komplek perumahan perkebunan.

2. Bagaimana hubungan sosial buruh dengan pimpinan dan buruh antar agama dan buruh dengan buruh di PTPN III Rantauprapat?
3. Bagaimana keadaan ekonomi buruh di PTPN III Rantauprapat?

Batasan spasial penulisan ini adalah desa Janji, kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Pengambilan batasan ini berdasarkan penggabungan perkebunan melalui peraturan pemerintah No.8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga persero digabung yaitu PT Perkebunan III, PT Perkebunan IV dan PT Perkebunan V dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Disertai cabang-cabang PT Perkebunan Nusantara III berbagai Kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara yaitu, Labuhanbatu Selatan maupun di Labuhanbatu Utara, Deli Serdang, Asahan dan Tapanuli Selatan. Perkebunan ini telah banyak menghasilkan sumber daya alam yang sampai sekarang menjadi bahan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Batasan temporal dari penulisan ini adalah meliputi kurun waktu 1996-2016. tahun 1996 menjadi batasan awal dikarenakan tahun terjadinya penggabungan antaran PT Perkebunan III, PT Perkebunan IV dan PT Perkebunan V menjadi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sehingga pada tahun 1996 menjadi awal baru bagi buruh untuk memperoleh nasibnya. Batasan akhir dari penulisan ini adalah pada tahun 2016 yang merupakan terjadinya perubahan kehidupan buruh dari bertambah tunjangan, gaji pokok naik dan meningkatnya kesejahteraan buruh dan disertai dengan meningkatnya produksi kelapa sawit.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu

1. Menjelaskan sistem perekrutan dan sistem kerja buruh PTPN III Rantauprapat.
2. Menjelaskan hubungan sosial buruh dengan pimpinan, buruh dengan buruh dan agama buruh sekitar PTPN III Rantauprapat.
3. Menjelaskan kehidupan ekonomi keluarga buruh di PTPN III Rantauprapat.

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana sistem perekrutan buruh yang dilaksanakan oleh PTPN III, sehingga berdampak nantinya kepada kehidupan buruh tersebut. Bukan saja dalam dunia kerja, namun juga dalam lingkup kehidupan sosial.

Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan terhadap pengetahuan tentang buruh, tujuan lain adalah menambah referensi hasil penelitian bagi peneliti. Selanjutnya untuk yang mengkaji penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan mengenai kehidupan sosial dan ekonomi buruh diperkebunan yang memiliki keterkaitan, antara lain : Erwiza Erman dan Ratna Saptari menulis tentang “ Dekolonisasi Buruh Kota Dan Pembentukan Bangsa” yang mendeskripsikan bahwa dalam sejarah Indonesia, buruh adalah sebuah kata yang tidak semua orang dapat menerimanya dengan baik karena berbagai alasan

subjektif masing-masing. Pada masa ketika sebuah rezim paranoid yang selalu mengalami ketakutan dan kecurigaan yang berlebihan terhadap masa lalu seperti Orde Baru misalnya, kata buruh sama sekali tidak memiliki hak hidup secara formal karena bayang-bayang tentang kelompok sosial ini yang selalu dikaitkan dengan ideologi kiri revolusioner atau komunis yang dianggap musuh utama rezim yang sedang berkuasa waktu itu.¹⁷

Buku kedua yang juga memiliki keterkaitan yaitu: Karl J. Pelzer yang menulis tentang “*Toean Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuang Agraria*”. Menjelaskan tentang permulaan abad ke-20 Sumatera Timur atau daerah Deli terkenal dengan sebutan “daerah dolar”. Sebutan ini erat hubungannya dengan derasnya keuntungan yang mengalir dari hasil onderneming yang melimpah ruah. Namun nasib buruh dan penduduknya tidak selalu sejalan dengan kekayaan para pengusaha onderneming. Para pengusaha tersebut merangkap menjadi majikan, polisi dan hakim bagi buruh-buruh. Mereka tidak pernah puas dengan hanya mengeksploitasi hasil bumi, mereka juga mencampuri hukum adat setempat. Demikianlah dolar yang bertaburan di Deli hampir tidak menyentuh kehidupan rakyat jelata. Bahkan mereka menjadi budak dinegeri sendiri, dan menjadi penyewa ditanah waris nenek moyangnya. Buku ini mengisahkan bagaimana rakus dan liciknya para pengusaha onderneming bersekongkol dengan raja- raja setempat merebut lahan pertanian Sumatera Timur dan sejengkal menjadi sehasta, dan dari sehasta menjadi sedepa, sampai akhirnya penduduk kehilangan haknya sama sekali.¹⁸

¹⁷ Erwija Erman dan Ratna Saptari, *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).

Rani Liliana menulis tentang “ Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Pertambangan Minyak PT. STANVAC Indonesia Lirik Kabupaten Indragiri Hulu-Riau” yang menjelaskan tentang kehidupan buruh perusahaan minyak. Merupakan perusahaan asing, yang menjadi buruh di perusahaan adalah mereka yang berasal dari daerah Jawa. Lama kelamaan tidak hanya orang Jawa dan masyarakat setempat, ada juga orang Minangkabau, Batak. Mengenai jenis buruh yang terdapat di PTSI yaitu buruh tetap dan buruh kontrak. Buruh tetap adalah buruh yang bekerja secara langsung dan terdaftar didalam administrasi perusahaan, sementara itu buruh kontrak adalah buruh yang bekerja melalui salah satu kontraktor yang bergabung kepada PTSI dan mereka biasanya bekerja berdasarkan kontrak yang telah disetujui, mereka tidak berurusan dengan pihak perusahaan, baik itu mengenai upah maupun hal lainnya.¹⁹

Yase Risel Nasution menulis tentang Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (PIR) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (1993-2005). Menjelaskan bahwa perkebunan rakyat adalah tanah yang diusahakan rakyat untuk tanaman seperti karet, kopi, cengkeh, kapuk, dan tebu. Pada dasarnya perkebunan dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan perkebunan dan usaha perkebunan rakyat. Di Indonesia perkebunan kelapa sawit dipisahkan menjadi dua, pertama, perkebunan kelapa sawit rakyat dengan pola perkebunan inti Tanam Paksa (1830-1870). bagian kedua meliputi periode 1870 sampai 1942. dilanjutkan dengan zaman Jepang (1942-1945), zaman Revolusi (1945-1950), masa kemerdekaan sejak 1950 sampai 1980-an. Tulisan tersebut memberikan gambaran

¹⁸ J. Pelzer Karl, *Toean Keboen dan Petani politik kolonial dan perjuangan Agraria*, (Jakarta:Penerbit sinar harapan, 1985).

¹⁹ Rani Liliana, Skripsi: *Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Pertambangan Minyak PT. STANVAC Indonesia Lirik Kabupaten Indragiri Hulu-Riau*, (Padang: Universitas Andalas, 2006).

latar belakang historis perkebunan di Indonesia sehingga keadaan perkembangan dewasa ini dapat dipahami sebagian besar sebagai lanjutan perkembangan dari masa kolonial.²⁰

Jan Breman menulis tentang menjinakkan sang kuli politik kolonial, tuan kebun, dan kuli di Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Menjelaskan tentang kehidupan buruh kontrak pada masa itu, dan hubungan buruh dengan para petinggi-petinggi lainnya. Pada masa itu buruh tidak mendapatkan keadilan yang semestinya seperti diseret kuda dengan tangan terikat, dipukuli dengan daun jelatang kemudian disiram air, ditusuk bagian bawah kukunya dengan serpihan bambu, atau bahkan digosok alat vitalnya dengan merica halus, sehingga tulisan ini menjadi bahan perbandingan dalam penulisan ini.²¹

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah sosial ekonomi karena membahas kehidupan buruh perkebunan. Sejarah sosial ekonomi menurut Kuntowijoyo mempunyai pembahasan yang sangat luas dan beragam. Kebanyakan sejarah sosial mempunyai hubungan erat dengan sejarah ekonomi, sehingga menjadi sebuah kajian sejarah sosial ekonomi.²² Sejarah sosial ekonomi biasanya meliputi aspek-aspek sosial dan ekonomi dari suatu masyarakat. Kehidupan sosial biasanya seperti, kehidupan keluarga beserta pendidikannya, gaya hidup yang meliputi perumahan, makanan, pakaian dan perawatan

²⁰ Yase Risel Nasution, Skripsi. *Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat*. (Padang : Universitas Andalas, 2008).

²¹ Breman Jan, *Menjinakkan Sang Kuli Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*. (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti,1997).

²² Kuntowijoyo. *Metodelogi Sejarah Yogyakarta*: (Tiara Wacana, 1994).

kesehatan.²³ Sementara itu sejarah ekonomi memusatkan perhatian terhadap aktivitas perekonomian suatu kelompok masyarakat yang mencakup produksi, konsumsi dan distribusi.²⁴

Selain melihat dari konsep sejarah sosial ekonomi, sesuai dengan judul skripsi ini yaitu: “ Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh PTPN III Rantauprapat Sumatera Utara tahun 1996-2016”, maka pembahasan ini juga akan memperjelas dengan melihat konsep maupun teori dari perkebunan, buruh, dan interaksi.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan tumbuhan lainnya. Ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Perkebunan dibedakan dari agroforestri dan silvikultur (budidaya hutan) karena sifat intensifnya. Dalam perkebunan pemeliharaan memegang peranan penting; sementara dalam agroforestri dan silvikultur, tanaman cenderung dibiarkan untuk tumbuh sesuai kondisi alam. Perkebunan menerapkan cara budidaya monokultur, kecuali untuk komoditas tertentu, seperti lada dan vanili. Penciri sekunder, yang tidak selalu berlaku, adalah adanya instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap hasil panen dari lahan perkebunan, sebelum produknya dipasarkan. Perkebunan dibedakan dari usaha tani pekarangan, terutama karena skala usaha dan pasar produknya. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung volume komoditas yang dihasilkan. Kepemilikan lahan bukan merupakan syarat

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal.,50.

²⁴ Bambang Rudito, *Adaptasi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, (Padang:pusat penelitian Universitas Andalas, 1991). hal.,50.

mutlak dalam perkebunan, sehingga untuk beberapa komoditas berkembang sistem sewa-menyewa lahan atau sistem pembagian usaha, seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR).²⁵

Buruh adalah tenaga kerja di lapangan baik dikota maupun didesa yang sudah merupakan golongan sosial tersendiri dalam masyarakat. Mereka menjadi ciri kehidupan dalam perekonomian. Buruh biasanya identik dengan sebutan buruh kasar, dengan pekerjaan kasar yang biasa di sebut kuli. Menurut Iman Soepomo dalam bukunya pengantar hukum perburuhan, buruh adalah seorang yang bekerja pada orang lain dengan bekerja secara fisik tanpa menggunakan pikiran biasanya buruh bekerja dengan sebutan majikan. Buruh menerima upah tanpa menyampingkan persoalan antara buruh bebas dengan buruh tetap yang memiliki persoalan antara pekerja dan pekerja.²⁶

Dalam Ensiklopedi Indonesia, buruh diartikan sebagai orang yang bekerja pada seorang majikan dengan mendapatkan upah.²⁷ Pengertian lain mengenai buruh adalah orang yang menjual tenaganya demi kelangsungan hidupnya. Ia tidak memiliki sarana atau faktor produksi selain tenaganya sendiri dan ia bekerja untuk menerima upah. Buruh juga merupakan sumber daya manusia yang diperlukan dalam produksi selain dan pemilik modal.²⁸ Sementara itu dalam percakapan sehari-hari buruh dibedakan atas 3 bentuk, yaitu pertama buruh kasar, maksudnya buruh yang bekerja hanya mengandalkan ototnya saja, seperti kuli di pasar, kedua adalah buruh kantor, maksudnya adalah buruh yang bekerja dikantor,

²⁵ Rahardi, *Agribisnis Tanaman Perkebunan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1993).

²⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuan*, (Jakarta:Djambatan,2003), hal., 3.

²⁷ Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 1 (Jakarta : Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1989), hal., 557.

²⁸ Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid III (Jakarta : Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1989), hal., 568.

selain menggunakan otot mereka juga harus memiliki kemampuan dalam segi berfikir. Ketiga adalah buruh terampil, yaitu buruh yang mempunyai keterampilan khusus seperti tukang, juru ketik, dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai buruh tidak terlepas dari sebutan kelas sosial. Keberadaan buruh di perusahaan-perusahaan industri dan juga perkebunan selalu saja tergolong dalam kelas sosial. Buruh masuk kedalam golongan kelas sosial. Merupakan sekelompok individu yang teroganisir yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelas sosial biasanya adalah selalu kelompok-kelompok yang bertentangan.²⁹

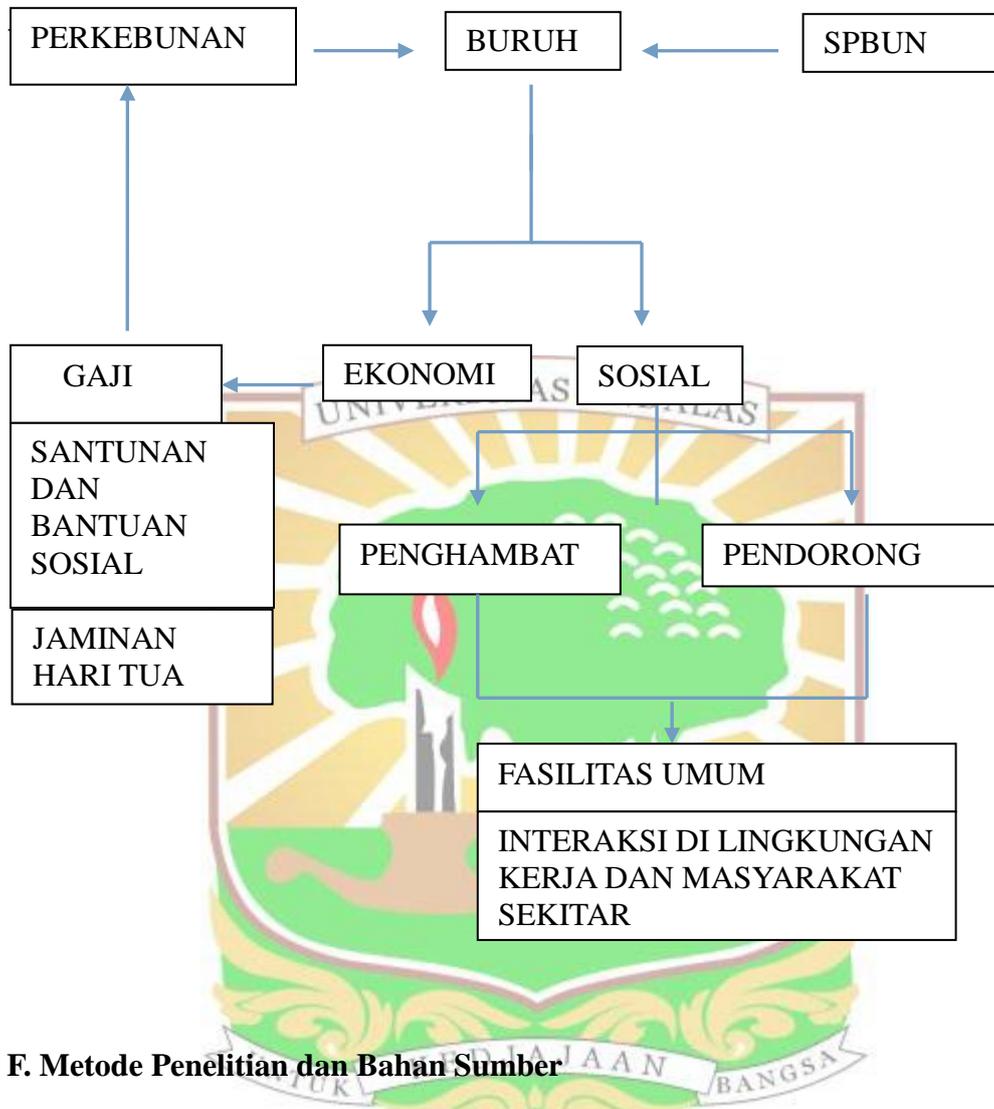
Interaksi sosial terjadi jika kelompok maupun individu-individu melakukan hubungan satu sama lain dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial sebagai unsur-unsur pokok dan struktur sosial. Interaksi sosial memiliki berbagai bentuk seperti kerja sama, persaingan, ataupun pertentangan maupun pertikaian. Interaksi sosial dapat terjadi dimana saja seperti di rumah, sekolah, pasar, kebun. Seperti halnya di PT Perkebunan Nusantara III Rantauprapat terjadinya interaksi sosial sangat besar kemungkinan. Interaksi Sosial Ekonomi PT Perkebunan Nusantara III Rantauprapat yang berhubungan dengan ekonomi, seperti gaji, santunan dan bantuan sosial jaminan hari tua, sosial yang mana akan terjadinya penghambat maupun pendorong dalam kehidupan buruh, sehingga dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.³⁰

²⁹ Dahrendorf Ralf, *Konflik dan konflik dalam masyarakat industry sebuah analisis-krisis*, (Jakarta:Rajawali, 1986), hal.,297.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal., 54

Bagan 1

Struktur Sosial –Ekonomi Buruh PT Perkebunan Nusantara III Rantau Prapat.



F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang melalui empat tahapan yaitu: pengumpulan data atau heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan.³¹ Heuristik adalah upaya pengumpulan sumber yang terdiri dari dua bentuk, yaitu sumber primer dan sumber skunder.

Untuk mengungkapkan tentang kehidupan buruh PTPN III Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara tahun 1996-2016, penulis akan menggunakan sumber

³¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal.,.32.

primer dan sumber skunder. Sumber primer mempunyai tiga bentuk, yaitu arsip, hasil-hasil wawancara dan hasil pengamatan dilapangan.³²Sumber primer yang diperoleh adalah profil perusahaan tentang sejarah perusahaan,arsip perusahaan,slip gaji buruh, surat rekrutmen, data statistik dan jumlah hasil produksi perusahaan tahun 1996-2015.

Selain sumber tertulis, dan juga dikumpulkan melalui sumber lisan yaitu wawancara. Dalam penulisan ini wawancara dilakukan dengan orang yang terlihat langsung dalam peristiwa yang akan dikaji. Beberapa tokoh yang diwawancarai adalah Budi, Khairul,Ahyar,Oloan,Ardi,Iwan,Misdi, Mulyadi, M.sibarani, dan Indah (buruh tetap di PTPN III Rantauprapat).

Setelah sumber primer, sumber berikutnya yang digunakan adalah sumber sekunder, yaitu berupa buku-buku, artikel koran, dan majalah. Data -data sumber sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menggunakan literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dibahas ini. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan perusahaan yang diteliti.

Sumber tersebut kemudian di teliti dan informasi terdapat di sumber tersebut perlu diadakan semacam perbandingan. Agar informasi yang diperoleh mempunyai kekuatan yang valid yaitu melalui kritik ekstern untuk mendapatkan autentitasnya dan kritik intern untuk mendapatkan kredibilitasnya. Selanjutnya dilakukan interpretasi yang bertujuan untuk menghubungkan suatu fakta dengan fakta lainnya, yang dapat menjadi sebuah kesatuan yang logis dan

³² *Ibid.*, hal., 35-36.

menempatkannya kedalam sebuah tulisan yang nantinya menghasilkan sebuah skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini dibagi kedalam lima bab antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Bab satu disebut dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan yang mengungkapkan mengenai latar belakang pemilihan tentang kehidupan sosial ekonomi buruh PTPN III Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian dilakukan pembatasan masalah dan rumusan permasalahan untuk mempermudah penelitian dan penulisan, ditentukan lagi tujuan dari penulisan nantinya, selain itu dalam bab ini juga terdapat kerangka analisis penulisan, metode yang digunakan dalam penulisan dan juga sistematis.

Bab dua merupakan gambaran umum PTPN III Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara. Pokok pembahasan meliputi geografi daerah perkebunan, keadaan penduduk, penggunaan lahan, dan sejarah PTPN III.

Bab tiga dibagi atas lima poin yaitu pada poin pertama, menjelaskan sistem perekrutan buruh di PTPN III Rantauprapat. Poin kedua menjelaskan karakteristik buruh di PTPN III Rantauprapat. Poin ketiga menjelaskan gaji buruh PTPN III Rantauprapat. Poin keempat menjelaskan sistem kerja buruh di PTPN III Rantauprapat dan Poin kelima menjelaskan pendidikan buruh di PTPN III Rantauprapat.

Bab empat di bagi atas lima poin yaitu poin pertama menjelaskan kehidupan sosial ekonomi buruh PTPN III Rantauparat. Poin kedua menjelaskan fasilitas umum PTPN III Rantauprapat. Poin ketiga menjelaskan hubungan buruh dengan

pimpinan. Poin keempat menjelaskan tentang hubungan antar agama. Poin kelima menjelaskan hubungan buruh dengan buruh dan menampilkan profil buruh yang bekerja di PTPN III Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara, yang bekerja sebagai buruh tetap.

Bab lima adalah penutup dari seluruh bab yang ada dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh bab. Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan.

